



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG PASAR
TRADISIONAL DI KAWASAN TEPI JALAN RAYA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012 PENGELOLA DAN PERBERDAYA PASAR
TRADISIONAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

SKRIPSI



Oleh :

MIFTAH AYU ERISMA
11727201991

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional Di Kawasan Tepi Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Kecamatan Bagan Sinembah”*** yang ditulis oleh:

Nama : MIFTAH AYU ERISMA
 NIM : 11727201991
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2021
 Pembimbing Skripsi


Mushim, S. Ag, SH. M. Hum.
 NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***“Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional Di Kawasan Tepi Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdaya Pasar Tradisional Kecamatan Bagan Sinembah”***

yang ditulis oleh :

Nama : **MIFTAH AYU ERISMA**
NIM : 11727201991
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji I
Rudiadi, SH., MH

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis., SH., MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

ABSTRAK

Miftah Ayu Erisma (2021) : “Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional di Kawasan Tepi Jalan Raya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Pengelola Dan Perberdaya Pasar Tradisional.

Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang dimulai pada sektor ekonomi. Baik sektor formal maupun sektor informal merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu daerah bahkan suatu bangsa. Untuk menciptakan suatu ketertiban diperlukan Koordinasi antara pihak-pihak yang berkewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi mengenai penertiban serta penataan pasar tradisional serta faktor dari pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Yuridis Sosiologis, sifat penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dan didapatkan dengan metode pengumpulan serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya kerjasama antara pihak-pihak terhadap penertiban serta penataan pasar, serta tidak tertatanya pasar pajak lama dikarenakan los yang digunakan banyak kerusakan sehingga para pedagang beralih atau tumpah ke bahu jalan. Sedangkan faktor yang menghambat dalam melaksanakan penertiban pedagang pasar tradisional Pajak Lama di kawasan tepian jalan Raya Kecamatan Bagan Sinembah. *Yang pertama*, ialah dari sarana-prasaran yang tidak tersedia. *Yang kedua*, ialah dalam penataan pasar menjadi tidak teratur ialah los yang mereka gunakan rusak. *Yang ketiga*, adanya perlawanan dari para pedagang yang tidak mau dihimbau ke pasar yang lebih layak. *Yang keempat*, ialah kurangnya tindakan serta penekanan dari pihak Pemerintah Daerah agar membantu menghimbau para pedagang pindah ke pasar Pemda guna mengurangi resiko serta faktor-faktor yang ada.

Kata kunci : *Koordinasi, Pasar Tradisional, Penataan.*

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT,
 atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan, serta kekuatan, kesehatan, dan

kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjunganku

Nabi Muhammad SAW

Karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kasih kepada

orang-orang yang selalu berharga dan berarti :

Ayahku (Drs. Elizar Siregar) dan Ibuku (RA. Rismawati)

Mereka orangtuaku yang dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan
 merawatku sedari kecil hingga mengantarkanku ke perguruan tinggi, serta
 memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
 terimakasih atas do'a restu & ridhanya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari
 berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih
 kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan
 motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama
 penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan
 kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang
 telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muslim, S. Ag, SH, M. Hum. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Lysa Angrayni S.H, M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Kepala Bidang Perhubungan Darat Kecamatan Bagan Sinembah, Komandan PTI Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah dan Jajarannya serta Masyarakat atau Pedagang Pasar Tradisional Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Team Inces House yang telah menemani, membantu, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebbaikannya, serta skripsi ini membari manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 28 Maret 2021

Penulis

MIFTAH AYU ERISMA
NIM. 11727201991



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis dan Studi Kepustakaan	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah	21
B. Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Koordinasi.....	29
B. Tinjauan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja ..	37
C. Tinjauan Pasar Tradisional.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional Di	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan Tepi Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012..... 59

B. Faktor penghambat Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar Tradisional Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah..... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Informan dalam Penelitian.....	17
Tabel II.1	Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa di Kecamatan Bagan Sinembah.....	23
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Kecamatan Bagan Sinembah	24
Tabel II.3	Lahan, Bangunan dan Pengelolaan Pasar Tradisional Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Kecamatan Bagan Sinembah	25
Gambar II.2	Struktur Kepengurusan Pasar Tradisional Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang dimulai pada sektor ekonomi. Baik sektor formal maupun sektor informal merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu daerah bahkan suatu bangsa. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pasar sebagai salah satu bentuk pelayanan publik untuk mempermudah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹

Dalam rangka mendukung suatu pembangunan nasional yang merata di setiap daerahnya, pemerintah dalam hal ini telah melimpahkan segala urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan umum diselenggarakan melalui garis dekonsentrasi. Hal tersebut tertuang didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang memuat tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati, Walikota, dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.²

¹ Wahyu Adji dkk, *Ekonomi: Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 56.

² UUD 1945 Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya kepala daerah merupakan pejabat yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, seorang kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah untuk menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pembangunan nasional antara lain Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan diundang-undangkan.³

Kewenangan terbatas yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam kaitannya di jalan raya tersirat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu contoh peran Dinas Perhubungan dalam menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu adalah dengan penegakan Pasal 276 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan*

³ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”⁴

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 148 ayat (1) menyatakan “bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 4 disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kemudian fungsi lainnya ialah penyusunan program, dan satuan polisi pamong praja pun telah menyusun program tersebut diantaranya ialah program kegiatan pembinaan dan pengaturan pedagang pasar tradisional untuk mewujudkan Kecamatan Bagan Sinembah yang Aman Nyaman, Tertib, Indah dan Bersih yang menjadi visi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah.⁵

Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan suatu koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.⁶

⁴ UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁶ <https://kbbi.web.id/koordinasi.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, pentingnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah. Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah sebagai instansi menangani kasus di jalan raya tepatnya di tepi jalan pasar tradisional pajak lama Bagan Sinembah melakukan tindakan upaya penertiban pedagang pasar tradisional, lalu lintas, serta ketentraman masyarakat yang aman, tertib dan lancar dengan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.

Penertiban pedagang pasar tradisional merupakan salah satu sasaran pemerintah kota dimanapun. Penertiban pedagang pasar tradisional merupakan salah satu hal yang dianggap penting karena menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di suatu kota. Berkenaan dengan pedagang pasar tradisional di suatu kota, kota yang menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Bagan Sinembah, dimana Kecamatan Bagan Sinembah yang menjadi pusat kota. Tepi jalan raya yang menjadi akses lalu lintas dari arah Sumatra Utara menuju Riau. Oleh karena itu kawasan tepi jalan raya tersebut perlu adanya penanganan khusus mengenai fungsi lahan dan kegunaan dari kawasan tersebut. Permasalahan yang sering dijumpai di kawasan tepia itu mengenai pedagang pasar tradisional yang bertempat di kawasan tepi jalan raya sedangkan kawasan tersebut bukan diperuntukan bagi pedagang pasar tradisional.

Karena pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual pembeli secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

langsung dan ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Peran pasar tradisional apabila dikelola dengan baik maka akan berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat karena menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah. Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya sebab ia adalah representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok tepatnya di pasar pagi Pajak Lama.⁷

Namun karena minimnya perhatian Pemerintah terhadap kondisi pasar pagi Pajak Lama Bagan Sinembah terus menuai pertanyaan masyarakat sekitar dan pengguna jalan, bahkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berbagai usaha penimbunan terhadap lubang di jalan lintas Sumatera itu sudah sering dilakukan, baik warga maupun aparat Satuan Polisi Pamong Praja Bagan Sinembah, namun hal itu seolah tak membuahkan hasil yang maksimal. Selain itu, penataan pasar yang terkesan asal itupun

⁷ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional : Potret Ekonomi Rakyat Kecil* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

kerap menjadi kawasan pasar semakin tidak tertata itu yang menjadi pemandangan setiap harinya.⁸

Hal ini jelas melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu kebijakan dan langkah pembinaan yang mesti dilakukan, antara lain melakukan pembinaan terhadap perkembangan pasar tradisional secara menyeluruh dan berkesinambungan antara lain : melalui pembangunan dan up grading (renovasi) pasar tradisional, pelatihan manajemen pengelolaan pasar tradisional dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pedagang.⁹

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional pasal 26 menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, serta yang berwenang harus melakukan pengelolaan, pengawasa, dan pembinaan pasar tradisional di Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayahnya. Namun kenyataannya mengenai penataan, pembinaan serta pengawasan pasar tradisional tidak terlaksananya penerapan Permen Nomor 20 Tahun 2012.¹⁰

Berdasarkan uraian dalam “Latar Belakang” diatas, penulis ingin melakukan penulisan tentang “Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional Di Kawasan Tepian Jalan

⁸ <http://riau86.com/news/detail/964/lagi%C2%A0-warga-keluhan-pajak-lama-bagan-batu-kota>.

⁹ Luh Kadek Budi Martini, dkk, Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Upaya Mengantisipasi Pertumbuhan Pasar Modern Di Bali, Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat (Lppm), Unmas Denpasar (29-30 Agustus 2016), 2.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional Pasal 26

Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelola Dan Pemberdaya Pasar Tradisional Kecamatan Bagan Sinembah” dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja belum terlaksana dengan baik.
2. Bahwa kebijakan tentang kewajiban memberikan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan.
3. Bahwa tidak adanya UPTD Dinas Perhubungan yang menetap di Kecamatan Bagan Sinembah.
4. Bahwa kurangnya kesadaran dari pihak pemerintah maupun masyarakat dan pedagang.
5. Bahwa kurangnya sarana prasarana dari pihak yang berwenang dalam penataan, pengelolaan, penertiban pasar tradisional.

Oleh sebab itu penulis tertarik dan ingin meneliti lebih dalam mengenai **“KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KAWASAN TEPIAN JALAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLA DAN PEMBERDAYA PASAR TRADISIONAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan dalam karya ilmiah ini difokuskan kepada Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan, Penertiban Pedagang Pasar Tradisional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penertiban pedagang pasar tradisional Pajak Lama di kawasan tepi jalan Raya Kecamatan Bagan Sinembah?
2. Apa faktor penghambat Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pedagang pasar tradisional Pajak Lama di kawasan tepi jalan Raya Kecamatan Bagan Sinembah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penertiban pedagang pasar tradisional Pajak Lama di kawasan tepi jalan Raya Kecamatan Bagan Sinembah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pedagang pasar tradisional Pajak Lama di kawasan tepi jalan Raya Kecamatan Bagan Sinembah.

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

- a. Kegunaan teoritis yaitu peneliti diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian di bidang Hukum Tata Negara.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah terkait penertiban pedagang pasar tradisional di pasar pajak lama.
- c. Kegunaan akademis yaitu sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

E. Kerangka Teoritis dan Studi Kepustakaan

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proses yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu model konseptual tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana teorisasi dari suatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting untuk sebuah masalah (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari suatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting untuk sebuah masalah.¹¹

Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk berkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, perkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan tidak akan tercapai.

Karakteristik koordinasi dapat diartikan adanya upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.¹²

¹¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-3, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 91.

¹² Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan ini, dibahas dan diadakan pertukaran pemikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
2. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinasi yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
3. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
4. Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.¹³

b. Teori Pasar

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.420/MPP/Kep/10/1997. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi,

¹³ Manullag, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 71-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa took, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola pedagang kecil dan menengah, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya prespektif penelitian ini, selain dari kajian teori yang telah dijelaskan, dilakukan juga review terdahulu beberapa penelitian sebelumnya.

a. Penelitian Agung Silitonga

Review pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agung Silitonga di Universitas Sumatera Utara tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pasar sudah berjalan maksimal dan pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan pasar tradisional mampu bersaing lebih baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena sebenarnya. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen. Berdasarkan hasil dari penelitian ini ialah kebijakan penataan pasar tradisional di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, dilihat dari sisi sumberdaya aparatur yang dimiliki dan standar kebijakannya. Namun dari sisi komunikasi antar badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan

¹⁴ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.420/MPP/Kep/10/1997



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik belum berjalan dengan maksimal. Dan hal inilah yang menjadi penghambat dari implementasi kebijakan penataan pasar tradisional.

b. Penelitian Ciplis Gema Qoriah

Review kedua, penelitian ini dilakukan oleh Ciplis Gema Qoriah di Universitas Jember tahun 2014 yang berjudul “ Model Penataan Pasar Tradisional Berdasarkan Karakteristik Kegiatan, Fasilitas dan Utilitas : Studi Kasus Pasar Tanjung di Kabupaten Jember”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui identifikasi potensi dan hambatan penataannya. Teknik pengumpulan data adalah metode survei, serta pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kondisi pasar tradisional yang sesuai dengan karakteristik, fasilitas, dan utilitasnya.

c. Penelitian Ahlul Hadi Azhari

Review ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahlul Hadi Azhari di Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020 berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pasar Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan”, memiliki tujuan untuk memberi kenyamanan dalam bertransaksi jual beli di pasar tradisional Barabai serta faktor penyebab dari ketidaktertiban pasar tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi,

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penertiban pasar Barabai belum baik dan faktor penghambatnya ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut, ditambah lagi belum adanya tindakan yang tegas di pasar tradisional Barabai.

G. Metode Penelitian

Kata metode penelitian berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.¹⁵

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode penelitian.¹⁶

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi

¹⁵ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁷ Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.¹⁸

b. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di pasar tradisional pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

c. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.¹⁹ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah serta masyarakat atau pedagang pasar tradisional pajak lama Kecamatan Bagan Sinembah.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 51.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 25.

¹⁹ http://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian, diakses pada tanggal 06 September 2020, pukul 21.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.²⁰ Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteleliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek dalam penulisan ini ialah Koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang pasar tradisional pajak lama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdaya Pasar Tradisional.

d. Informan Peneliti

Informan adalah orang yang benar-bener mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah :²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Informan dalam Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Hadiyono S.H	Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Kecamatan Bagan Sinembah
2	Eko Budi S	Komandan PTI Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Bagan Sinembah

Sumber : Data Olahan 2021

e. Bahan Hukum

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.²²

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, surat kabar dan sebagainya.

f. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, penelitian mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.²³ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala Bidang Perhubungan Darat Kecamatan Bagan Sinembah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah.
3. Study Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan

²² Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 112.

²³ Opcit, hlm. 138

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

g. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, pembatas masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Sejarah Kecamatan Bagan Sinembah, Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah, Profil Kecamatan Bagan Sinembah, Visi-Misi Kecamatan Bagan Sinembah, serta Gambaran Umum Pasar Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang teori koordinasi, teori penataan, teori pembinaan serta teori pasar tradisional dan pembinaan dalam penyedia fasilitas Pasar Tradisional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan apa saja hambatan terhadap penertiban pedagang pasar tradisional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah

1. Sejarah Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang terletak 180 Km dari kota kabupaten yang merupakan Jalan lintas Sumatera dan mempunyai julukan kota sawit. Berdirinya kecamatan Bagan Sinembah diawali dengan masuknya pola perkebunan oleh PT Perkebunan Nusantara, yang diprakarsai oleh Wan Muhammad Noor setelah bertemu dengan presiden Soeharto saat meresmikan pabrik kelapa sawit Torgamba pada tahun 1984, setelah persetujuan di dapat dari presiden, maka penghulu Bagan Sinembah dahulu Wan Muhammad Noor membuat kesepakatan dengan manajer Torgamba, Anton Hasibuan, yang mengatakan bahwa 20 persen diberi untuk masyarakat lokal dan 80 persen untuk transmigrasi yang didatangkan dari pulau Jawa, dari kesepakatan itu maka dilakukanlah pematangan lahan yang dilanjutkan dengan penanaman, sehingga pada tahun 1987 para transmigrasi mulai masuk ke wilayah Bagan Sinembah dan tersebar ke beberapa tempat.

Melihat mulai ramainya penduduk Bagan Sinembah yang pada waktu itu masih masuk kecamatan Kubu, maka para pelaku sejarah mengusulkan untuk dibentuknya Kepenghuluan Bagan Sinembah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Kecamatan Bagan Sinembah. Maka pada tanggal 04 Januari 1995 diresmikan menjadi Kecamatan Bagan Sinembah, dan dipimpin oleh Wan Ahmad Syaiful sebagai camat pertama.

2. Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah berada di Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai luas 141.225 Ha, adapun batasan-batasan wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan;
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pujud;
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; dan
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.

Dilihat dari lokasi wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah bertofografi dataran rendah/hamparan dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan *gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Dengan tofografi dataran rendah/hamparan Kecamatan Bagan Sinembah merupakan daerah lintas Sumatera yang ramai dilalui kendaraan, selain itu didaerah ini juga banyak terdapat perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh swasta.

3. Keadaan Demografis (Kependudukan)

Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan laporan penduduk tahun 2019 dari sekecamatan Bagan Sinembah adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 59.813 jiwa dengan jumlah laki-laki 30.144 dan perempuan 29.669, sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 15.408.

Dari jumlah penduduk sebanyak 59.813 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai berikut :

Tabel II.1
Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Desa
di Kecamatan Bagan Sinembah

Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga	Penduduk		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
Bahtera Makmur	1.065	2.379	2.281	4.660
Gelora	531	1.157	1.085	2.242
Pelita	472	844	830	1.674
Bagan Batu	2.456	4.520	4.314	8.834
Suka Maju	296	509	495	1.004
Bagan Manunggal	715	1.179	1.202	2.381
Bagan Sapta Permai	418	865	827	1.692
Bakti Makmur	683	1.687	1.690	3.377
Jaya Agung	468	889	842	1.731
Meranti Makmur	368	694	687	1.381
Bayangkara Jaya	234	507	491	998
Bahtera Makmur Kota	1.221	1.702	1.601	3.303
Bagan Batu Kota	2.808	6.515	6.855	13.370
Bagan Batu Barat	1.950	3.776	3.752	7.528
Jadi Makmur	847	974	972	1.946
M urini Makmur	456	1.206	1.023	2.229
Bakti Jaya	420	741	722	1.463
Jumlah	15.408	30.144	29.669	59.813

Sumber : Kecamatan Bagan Sinembah Dalam Angka 2020

Berdasarkan data yang tersaji di atas, menunjukkan bahwa penduduk kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah laki-laki sebesar 30.144 jiwa dan perempuan sebanyak 29.669 jiwa serta jumlah keluarga sebanyak 15.408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah pada umumnya mempunyai mata pencaharian petani kelapa sawit. Karena disebabkan pertanahan yang mengizinkan untuk bertani kelapa sawit, kemudian waktu luang tersebut digunakan dengan kerja sambilan atau sampingan seperti, berdagang, tukang dan jasa. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dapat Dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	21.946	62,34
2	Nelayan	-	0
3	Pengerajin	100	0,28
4	Pengusaha	1.411	4,00
5	Buruh Bangunan	1.623	4,61
6	Pengangkutan	1.291	3,67
7	PNS	371	1,05
8	ABRI	56	0,16
9	Pensiunan ABRI	165	0,47
10	Peternak	869	2,55
11	Lain-lain	7.346	20,87
Jumlah		35205	100

Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Bagan Sinembah pada umumnya adalah Petani yaitu dengan jumlah 21.946 Orang dengan persentase 62,34%. Dan mata pencaharian yang paling sedikit di miliki oleh masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah yaitu ABRI yaitu 56 orang dengan persentase 0,16%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

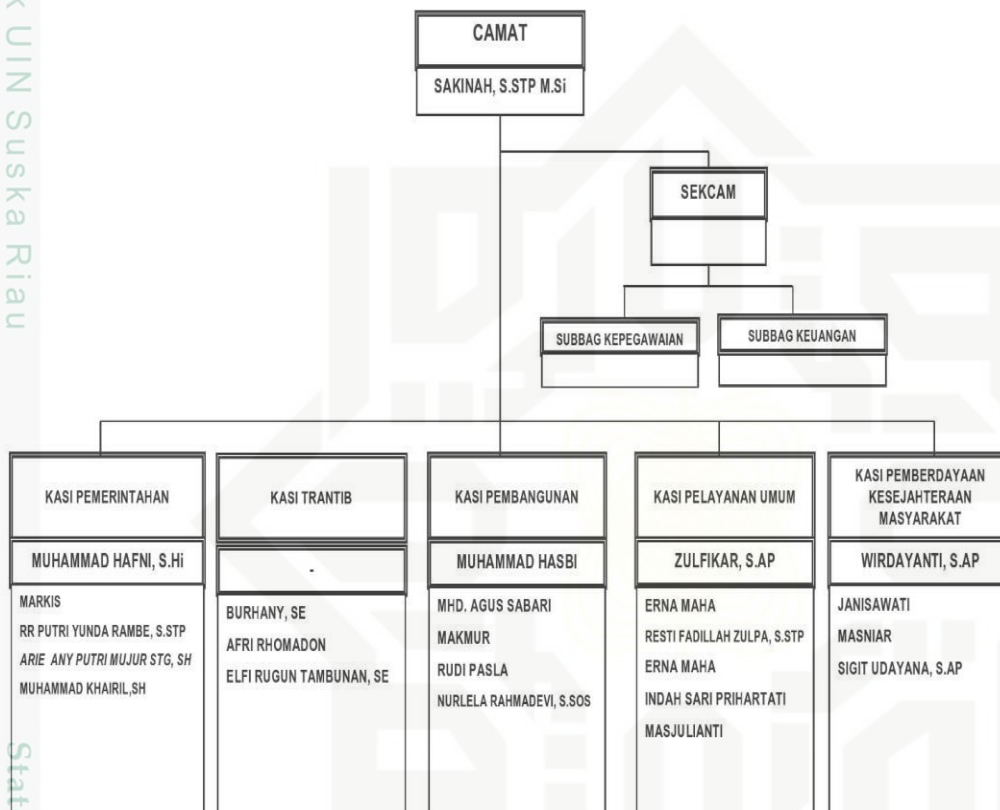
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bagan Sinembah

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

LAMPIRAN : PERDA KAB. ROKAN HILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2007
TANGGAL : 11 DESEMBER 2007



B. Gambaran umum Pasar Tradisional Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah

1. Sejarah Pasar Tradisional Pajak Lama

Pasar Tradisional Pajak Lama merupakan pasar tradisional yang berdiri pertama kali di Kecamatan Bagan Sinembah pada tahun 1980-an yang luasnya kurang lebih 1 Hektar (10.000^{m2}) yang lama-kelamaan berkembang pesat sampai sekarang ini, tetapi wilayahnya masih menjadi perwakilan dari Kecamatan Kubu. Pada tahun 1991 Kecamatan Bagan Sinembah masih wilayah Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Kubu Perwakilan Bagan Batu. Pada tahun 2001 terjadi pemekaran Kabupaten menjadi Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut kronologinya status pasar pajak lama ini bukan milik Pemerintah Daerah tetapi milik pribadi atas azas kemandirian masyarakat setempat yang sampai sekarang berfungsi sebagaimana layaknya pasar tradisional yang ada di daerah lain dan pasar tradisional pajak lama ini beroperasi setiap hari dari pagi hingga sore hari.

Dalam penataan pasar tradisional ini masih berkoordinasi pada pemilik pasar yang mana pada pasar ini kurang lebih memiliki 6-7 los (lapak) atau setiap los itu berisi 103 tempat dan kios kurang lebih 100 kios. Pada tanggal 23 Februari 2021 baru terjadi kebakaran yang mengakibatkan beberapa los di pasar tersebut hangus terbakar, namun semua kerugian tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah melainkan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik disetiap los saja yang mana setiap los dikelola oleh orang yang berbeda. Adapun beberapa rincian mengenai pengelolaan lahan dan bangunan pasar pajak lama sebagai berikut :

Tabel II.3
Lahan, Bangunan dan Pengelolaan Pasar Tadisional
Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah

No	Lahan, Bangunan dan Pengelolaan Pasar	Keterangan
1	Luas lahan pasar	10.000 ^{m2}
2	Status kepemilikan pasar	Pribadi (swasta)
3	Luas bangunan pasar	6.000 ^{m2}
4	Jumlah kios	± 100
5	Jumlah los	± 7
6	Jumlah seluruh lapak dalam setiap los	103
7	Hari pasar dalam seminggu	7 hari
8	Operasional pasar dalam sehari	Pagi-Sore
9	Unit kerja pengegola	Swasta

Sumber :Komandan P.T.I/Eko Budi S

1. Visi-Misi Pasar Tadisional Pajak Lama Kecamatan Bagan Sinembah

a. Visi :

- ❖ “Menjadikan Pasar Lama yang Aman, Nyaman, serta Strategis bagi Masyarakat Bagan Batu”

b. Misi :

- ❖ Memberikan pelayanan yang unggul dalam pengelolaan pasar yang sehat, bersih, aman, nyaman dan kompetitif untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ❖ Membangun dan bekerjasama dalam pengembangan pasar-pasar lingkungan yang lebih menyebar untuk keperluan seperti memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gambar II.2
Struktur Kepengurusan Pasar Tradisional Pajak Lama
Kecamatan Bagan Sinembah



2. Uraian Tugas (*job description*) Kepengurusan Pasar Pajak Lama

a. Kantor Lingkungan Hidup

- Membersihkan lingkungan pasar
- Mengangkut sampah

b. Masyarakat setempat

- Penjagaan malam di lingkungan pasar

c. PP (Pemuda Pancasila)/Organisasi Lain

- Penertiban parkir di area pasar pajak lama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6m) dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi merupakan bagian terpenting di antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi yang pekerjaannya saling bergantung. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga akan terjadi negosiasi agar mendapat kesepakatan.²⁵

Sedangkan menurut Hadayaningrat mengatakan bahwa koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.²⁶

2. Ciri-ciri Koordinasi

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas pimpinan, sekalipun pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan

²⁵ Malayu Hasibuan. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.85.

²⁶ Soewarno Handayaningrat. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), hlm.88.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.

- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (*continue process*). Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (*continue process*). Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- e. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Hal ini berarti pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama.

3. Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan dari usaha/ tindakan meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.²⁷

Sebagai kegiatan pastinya memiliki tujuan, koordinasi juga memiliki tujuan sebagai berikut :

²⁷ Ibid, hlm.89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan dari usaha/ tindakan meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsifantisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.²⁸

Adanya koordinasi diharapkan akan membuat keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga tiap departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras. Koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang serasi, selaras dan seimbang. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan. Terdapat (3) tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi yaitu:

²⁸ Ndraha Taliziduhu. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm.295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*); apabila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi saling tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang mengusahakan untuk hasil akhir.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), dimana satuan-satuan organisasi harus melaksanakan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
- c. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.²⁹

4. Jenis-jenis Koordinasi

Terdapat jenis-jenis koordinasi diantaranya yaitu:

- a. Koordinasi Intern

Koordinasi Intern yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung. Dalam koordinasi ini manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan, apakah bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.

²⁹ T. Hani Handoko. *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm.196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal, hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai hubungan secara fungsional yang bersifat intern dan ekstern.

- 1) Koordinasi Fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional ini diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit lainnya mempunyai hubungan kerja fungsional.
- 2) Koordinasi Fungsional yang bersifat ekstern, adalah koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan, karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari orang lainnya. Misalnya: Departemen Pemerintah RI.³⁰

³⁰ Opcit, Malayu Hasibuan. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.90-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Karakteristik Koordinasi

Koordinasi yang baik harus dapat menciptakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi. Pembagian tugas berkaitan dengan proses membagi tugas ke dalam suatu unit-unit tugas yang secara berturut-turut lebih kecil. Semua tugas dispesialisasikan ke dalam derajat yang sama, karena tidak semua orang dapat melakukan sesuatu, tetapi beberapa tugas sangat berbeda dengan tugas yang lainnya. Salah satu manfaat utama dari mengorganisasikan tugas adalah bahwa kelompok orang yang bekerja sama melalui pembagian kerja mampu menghasilkan lebih dari yang mereka hasilkan sendiri.
- b. Adanya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi. Manusia memiliki kepribadian yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Oleh karena itu manusia akan selalu melakukan interaksi dan kerjasama dengan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya. Kerjasama juga dilakukan agar individu dapat mempermudah dalam melakukan kegiatannya, dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan semangat kerja sama yang besardalam organisasi maka hasil yang didapatkan maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup di antara orang-orang dalam organisasi. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang baik, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan pemrosesan informasi, semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi, sedangkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti email dan sebagainya untuk mempermudah proses koordinasi tersebut. Tugas-tugas memerlukan kontak dan tingkat koordinasi yang tinggi antara atasan dengan bawahan. maka seharusnya menggunakan rentang kendali yang sempit.
- d. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian. Perencanaan yang dimaksud yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Jika sejak awal telah melakukan perencanaan dengan tepat, maka prosesproses berikutnya akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi yangdicapai juga akan maksimal. Jika rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi telah ditetapkan, kemudian dilakukan proses pembimbingan agar rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorganisasian. Dalam kegiatan koordinasi, pengendalian memiliki peran yang sangat penting. Fungsi proses pengendalian ini adalah untuk mengevaluasi tujuan yang telah dicapai, dan apabila tujuan tidak tercapai dengan baik, maka dapat dicari mengenai faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian koordinasi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menyerasikan kesamaan tiap langkah dan kegiatan oleh antar organisasi agar tercapai suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini koordinasi dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana koordinasi yang dapat menentukan langkah dan mengambil keputusan, dan pihak lainnya seperti swasta dan masyarakat.

Didalam berkoordinasi tidak jauh dari organisasi. Adapun pengertian organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan yang dikoordinasikan secara sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Karena organisasi merupakan kesatuan sosial,

³¹ Ibnu Syamsi. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk tidak hanya sekadar meminimalkan kelebihan (*redundancy*), namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan.

Organisasi ini memiliki efektivitas yakni dimana Pengertian efektivitas organisasi mengungkapkan konsep efektivitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas organisasi harus dapat menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output proses juga harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber daya, terus memprosesnya, dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan pada lingkungannya.³²

B. Tinjauan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah atau suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali

³² Sutrisno Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan diundang-undangkan adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- a. *Kepala Dinas* : Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai pengorganisasian, pelayanan umum dan teknis, pengendalian, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan lapangan, pembiayaan, penelitian dan pengkajian serta pelaporan.
- b. *Sekretariat* : Sekretariat Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di lingkungan dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, program dan keuangan dinas;
 - 2) Penyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
 - 3) Pengkoordinasian, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
 - 4) Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
 - 5) pengkoordinasian dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
 - 6) Pengkoordinasian, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga serta penyusunan program di lingkungan dinas; dan
 - 7) pengkoordinasian dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- c. *Sub Dinas Perhubungan Darat* : Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perhubungan Darat. Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perencanaan tugas-tugas pada Bidang Perhubungan Darat;
 - 2) Pengelompokan tugas yang akan dikerjakan untuk menentukan urutan ataupun prioritas tugas;
 - 3) Pelaksanaan tugas-tugas Bidang Perhubungan darat meliputi pengendalian atas perencanaan, pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengawasan teknis sarana dan prasarana Perhubungan Darat;
 - 4) Pembinaan, pengawasan terhadap bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang Perhubungan Darat; dan
 - 5) Pembinaan, pengawasan terhadap bimbingan keselamatan dan lingkungan Dinas Perhubungan.
- d. *Sub Dinas Perhubungan Laut dan Udara* : Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Perhubungan Laut dan Udara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- 1) Merencanakan tugas-tugas yang dilaksanakan secara terprogram dan sistematis dalam skala harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menganalisa tugas yang dikerjakan dengan cara membaca disposisi, isi surat, dokumen lain atau program kerja masing-masing seksi untuk menentukan prioritas tugas;
 - 3) Mendelegasikan tugas yang diberikan pimpinan kepada kepala seksi;
 - 4) Meberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dengan cara langsung atau tulisan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - 5) Meneliti dan mengkaji program kerja masing-masing seksi dengan cara membaca, mengoreksi dan memberikan catatan agar dapat ditetapkan program kerja/kegiatan sesuai dengan ketentuan; dan
 - 6) menyusun program kerja kegiatan dan anggaran pada Bidang Perhubungan Laut dan Udara sebagai bahan usulan kegiatan Dinas Perhubungan.
- e. *Bagian Tata Usaha* : Kepala Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas :
- 1) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- 3) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/tata usaha dan perlengkapan;
- 4) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum, dan perlengkapan;
- 5) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- 6) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor; dan
- 7) melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara- upacara, dan rapat-rapat dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Sub Bagian Perencanaan dan Program* : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program yang mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan di bidang Proram dan Keuangan;
- 2) Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang perencanaan dan program dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas;
- 4) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- 5) Mengumpulkan data informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- 6) Merumuskan dan menyusun Renstra, Renja RKA dan program pembangunan tiap tahunnya di lingkungan dinas;
- 7) Menyusun LAKIP, LPPD dan LKPI dinas;
- 8) Menyusun Buku Profil Dinas;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Menghimpun dan merumuskan petunjuk teknis yang berhubungan dengan sub bagian Perencanaan dan Program; dan
- 11) Membagi bimbingan, petunjuk dan pembinaan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan.³³

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda, peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala dan berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi.

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja :

- 1) Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas lainnya yang meliputi ;

³³ Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebar luasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Importir Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c) Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- e) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala masal; dan
- f) Pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja :

Fungsi Satuan polisi pamog praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyelenggaraan keteriban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat dengan kepolisian, PPNS dan/atau aparat lainnnya;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mengetahui dan mentaati Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- 5) Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
- 6) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan perda, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.³⁴

³⁴ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar

Kata pasar diduga berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “*pancawarna*”. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pasar merupakan sebuah tempat untuk kegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari derma.

Adapun pengertian pasar menurut para ahli adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang mejadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.³⁵

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di jelaskan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang di bangun dan di kelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/di kelola oleh pedagang kecil menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.³⁶

2. Fungsi Pasar

Pasar juga memiliki beberapa fungsi bagi masyarakat yang terdiri dari :

a. Sarana distribusi

Fungsi utama dari pasar adalah merupakan tempat dimana terjadinya proses distribusi, baik distribusi bagi produsen maupun konsumen. Dengan adanya pasar produsen bisa memasarkan dan menjual barang-barang hasil produksinya dan konsumen bisa mendapatkan kebutuhannya melalui barang-barang yang ada di pasar. Pada intinya pasar menjadi jembatan penghubung antara

³⁵ Mankiw Gregory. *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.33.

³⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013, Pasal 1 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produsen dan konsumen, produsen yang telah memproduksi barang-barang bisa menjual dan menawarkan pada konsumen dan konsumen yang memiliki kebutuhan bisa terbantu dengan adanya barang-barang tersebut.

b. Pembentuk harga atau penentu nilai

Pasar berfungsi untuk membentuk dan menetapkan harga dengan tujuan di semua tempat dan kalangan harga itu sama tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku seperti harga disesuaikan dengan geografis, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian yang berupa permintaan dan penawaran serta masih banyak lainnya. Itu semua dalam ruang lingkup besar, sedangkan dalam ruang lingkup kecil fungsi pasar yang menjadi pembentuk harga dilihat ketika ada proses tawar menawar antara pembeli dan penjual yang menghasilkan harga minimal namun tetap menguntungkan bagi produsen atau penjualnya.

c. Sebagai sarana untuk promosi

Pasar menjadi salah satu tempat paling efektif untuk digunakan sebagai sarana promosi. Dikarenakan dalam pasar terdapat banyak orang dan kerumunan yang sedang mencari kebutuhannya. Hal inilah yang dijadikan produsen sebagai ajang untuk pengenalan produk-produk yang dimilikinya dengan harapan banyak konsumen yang tertarik akan barang produksinya tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tempat mencari keuntungan

Adanya keberadaan pasar, membuat para produsen bisa menjual barang dagangannya yang akan memberikan pemasukan bagi mereka para produsen. Pasar disini sangat membantu karena semua pihak tidak perlu membangun dari awal jaringan konsumsi atau sulit mencari konsumen, namun dalam pasar masalah tersebut akan hilang karena dalam pasar sudah terdapat satu kesatuan antara produsen dan konsumen dimana semua saling mencari keuntungan baik dari segi moral maupun materil.

e. Pembentukan kreatifitas

Hadirnya pasar bisa membentuk kreatifitas tinggi bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen kreatifitas dan inovasi wajib dilakukan untuk selalu menarik konsumen untuk membeli hasil produksinya, selain itu kreatifitas harus tetap dilakukan sesuatu yang baru harus diciptakan agar tetap bisa bersaing dan bertahan di pasar. Sedangkan untuk konsumen kreatifitas mereka akan terlatih untuk melatih kepekaannya dalam memilih dan memutuskan hasil produksi atau barang yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

f. Sebagai tempat mempererat silaturahmi

Sebuah Pasar pasti akan terjadi sebuah komunikasi ataupun interaksi antar pihak yang bersangkutan. Tidak disadari hal sederhana tersebut dapat menjadi kegiatan silaturrahi antar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu. Selain kegiatan atau kebutuhan ekonomi terpenuhi kebutuhan sosialpun akan terpenuhi pula. Selain itu dengan adanya pasar bisa menjadi fasilitas dimana bertemunya dua pihak yang saling memiliki tujuan bertemu untuk membuat suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam kegiatan jual beli dan tawar menawar.

g. Sarana pembangunan nasional

Pasar memiliki kaitan erat dengan pembangunan nasional, karena dalam pasar tersedia bahan, alat atau sumber daya lain yang bisa digunakan sebagai bahan dasar pembangunan. Selain itu pasar juga menjadi salah satu pemasok dana bagi pembangunan yang ada yakni dari pajak yang mereka bayarkan. Inilah yang mendasari fungsi pasar sebagai sarana pembangunan nasional.

h. Meningkatkan pemasukan negara

Pasar menjadi salah satu pihak penyumbang dana terbesar bagi negara, karena dalam pasar hampir semuanya berkaitan dengan uang dan keuntungan. Kegiatan produksi menghasilkan uang yang harus dibayarkan sebagian untuk pajak, kegiatan konsumsi juga menghasilkan uang yang pada akhirnya harus disisihkan untuk membayar sewa lokasi atau sewa tempat dan masih banyak lainnya. Bisa dibilang pemasukan negara akan membaik jika kondisi pasar negara tersebut juga baik. Jadi pada dasarnya kehadiran pasar bisa membantu pemerintah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yakni kesejahteraan masyarakat.

i. Mengontrol kegiatan ekonomi

Keberadaan pasar sangat membantu pemerintah atau negara dalam mengontrol segala kegiatan dan alur perekonomian negara. Bisa kita bayangkan ketika tidak ada pasar maka konsentrasi pemerintah akan terpecah belah dan hal ini menyulitkan bagi mereka untuk mengontrol dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Jadi dengan demikian dengan adanya pasar bisa membantu pemerintah fokus dalam menjalankan alur perekonomian dengan pengawasan yang terfokus pada satu titik.³⁷

3. Pengelolaan Pasar

Dalam hal pengelolaan pasar perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:

a. Perencanaan tata ruang

Pola perletakan berbagai prasarana dan sarana yang ada telah harus mempertimbangkan beberapa pendekatan antara lain:

- 1) Memiliki pengaturan yang baik terhadap pola sirkulasi barang dan pengunjung di dalam pasar dan memiliki tempat parkir kendaraan yang mencukupi sehingga keluar masuknya kendaraan tidak macet;
- 2) Distribusi pedagang harus merata atau tidak menumpuk di satu tempat;

³⁷ H. Sugiarto Fuad, Nurlela. *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memiliki ketersediaan jumlah kios dan los yang memadai untuk para pedagang;
- 4) Memiliki tempat penimbunan sampah sementara (TPS) yang mencukupi;
- 5) Terdapat berbagai fasilitas umum: ATM Centre, pos jaga kesehatan, mushola, toilet, dll; dan
- 6) Tempat pemotongan ayam yang terpisah dari bangunan utama.

b. Penataan Dagangan

Perlu adanya jenis tempat berdagang bagi pedagang untuk berjualan barang dagangannya. Jenis tempat tersebut dapat berupa kios dan lapak.

c. Bangunan Pasar

- 1) Bangunan fisik pasar yang kuat;
- 2) Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi para pengunjung dan dapat menghemat energi karena tidak diperlukan penerangan tambahan; dan
- 3) Lantai disemen sehingga tidak becek apabila ada air yang menggenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pengaturan Lalu lintas

Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para pengunjung pasar maka pengaturan lalu lintas dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kendaraan pengunjung harus dapat parkir di dalam area pasar;
- 2) Terdapat jalan yang mengelilingi pasar dan mencukupi untuk keperluan bongkar muat pedagang dan memiliki; dan
- 3) lajur guna menghindari penumpukan/antrian.

e. Pencegahan Kebakaran dan perangkat

Penanggulangan kebakaran dilakukan dengan penyediaan tabung pemadam pada setiap grup kios. Hidran untuk armada pemadam kebakaran harus tersedia di tempat yang mudah dijangkau.

f. Kebersihan Pasar Tradisional

Untuk menjaga kebersihan pasar, maka model penataan pasar tradisional yang tepat adalah dengan adanya pengelolaan sampah yang baik. Sampah-sampah pasar yang tidak terpakai dapat dikumpulkan, kemudian diolah kembali. Untuk menjaga kebersihan maka pihak pengelola pasar dapat menyediakan tempat sampah yang disediakan di tempat yang strategis sehingga pembeli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun pedagang yang akan membuang sampah dapat membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan.³⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, tujuan dari manajemen pasar tradisional antara lain :

- 1) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- 4) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat pembelanjaan dan toko modern.

Selain menjelaskan tentang tujuan manajemen pasar, adapun ciri-ciri pasar sebagai berikut :

- 1) Dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Swasta;
- 2) Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli;
- 3) Terdapat berbagai macam jenis usaha yang menyatu pada lokasi yang sama; dan
- 4) Sebagian besar barang dan jasa yang dijual berbahan lokal.³⁹

³⁸ Rahman Syahputra. *Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional*, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol. 14, No. 3, (September 2016), hlm.157-236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tujuan dan ciri-ciri dari pasar pentingnya peranan pemerintah dalam mewujudkan suatu tujuan tersebut. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat;
- b) Peranan merupakan suatu konsep atau prihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi; dan
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.⁴⁰

4. Pengertian Penertiban

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan akhiran -kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja, yang dimaksud penertiban adalah “ Tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional

⁴⁰ Suejono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2005), hlm.244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.⁴¹

5. Pengertian Penataan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penataan berasal dari kata tata yang berarti aturan dan sistem. Yang mana Penataan merupakan proses, cara, perbuatan menata, pengaturan dan penyusunan. Menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan dan system. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Untuk itu, Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanja Bagian Pertama pasal 2 menyatakan penataan pasar tradisional harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya;

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat;
 - 2) Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - 3) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - 4) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- c. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.⁴²

⁴² Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan Bagian Pertama pasal 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Kecamatan Bagan Sinembah belum terlaksana dengan baik. Karena kurangnya kerjasama antara pihak-pihak tertentu yang menjadi masalah terhadap penertiban serta penataan pasar, dari kurangnya sarana-prasarana terhadap lokasi parkir honda yang sampai saat ini masih berada di bahu jalan yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu serta sarana-prasana lokasi mobil muatan untuk membongkar barang dagangan yang sampai saat ini masih beraktivitas di tepi jalan raya. Serta tidak tertatanya pasar pajak lama dikarenakan los yang digunakan banyak kerusakan sehingga para pedagang beralih atau tumpah ke bahu jalan.
2. Faktor Penghambat dari hasil penelitian ialah yang pertama, dari sarana-prasaran yang tidak tersedia dikarenakan kurang terbantunya dari pihak atasan seperti terhambatnya dana alokasi, permasalahan tanah jalan untuk mobil angkutan barang yang mengakibatkan para pemasok barang dagangan yang membongkar muatan barang dagangan dilakukan di tepi jalan raya dan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Yang kedua, dalam penataan pasar yang menjadi pasar pajak lama tidak teratur ialah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

los yang mereka gunakan rusak sehingga para pedagang mengambil keuntungan di bahu jalan dengan tidak memikirkan apakah ada resiko yang fatal, dari macetnya arus lalu lintas yang mengakibatkan rawan kecelakaan yang tinggi. Yang ketiga, adanya perlawanan dari para pedagang yang tidak mau dihimbau ke pasar yang lebih layak, dari perlawanan fisik, melalui media sosial dan adanya hasutan dari pihak yang tidak menyukai pihak dari rekan kerja sendiri sehingga menjadi konflik yang belum bisa teratasi. Yang keempat ialah kurangnya tindakan serta penekanan dari pihak Pemerintah Daerah agar membantu menghimbau para pedagang pindah ke pasar Pemda yang lebih layak yang akan mengurangi resiko serta faktor-faktor yang ada.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar meningkatkan kerjasama dalam penataan pedagang tradisional di pasar pajak lama demi terciptanya suasana pasar yang aman dan kondusif.
2. Untuk pedagang pasar pajak lama agar lebih memperhatikan dan mendengarkan himbauan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar tidak berdagang di bahu jalan demi terciptanya keselamatan dan keamanan antara pedagang dengan pengendara jalan raya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Wahyu dkk. *Ekonomi: Jilid 3*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Efendi, Jonaedi dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Edy, Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gregory, Mankiw. *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Handoko, Hani. T. *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional : Potret Ekonomi Rakyat Kecil* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Manullag, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nurlela, Fuad, Sugiarto. H. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Soekanto, Suerjono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2005.
- Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, Jakarta : Salemba Empat, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-3, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Syamsi, Ibnu. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Taliziduhu, Ndraha. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013, Pasal 1 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 26.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.420/MPP/Kep/10/1997.
- Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanja.
- Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanja Bagian Pertama pasal 2.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Jurnal

Maritini Budi Kadek Luh, dkk. *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Upaya Mengantisipasi Pertumbuhan Pasar Modern Di Bali, Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat (Lppm), Unmas Denpasar.*

Syahputra, Rahman. *Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 14, No. 3.

Website

<https://kbbi.web.id/koordinasi.html>.

http://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian.

<http://riau86.com/news/detail/964/lagi%C2%A0-warga-keluhan-pajak-lama-bagan-batu-kota>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Eko Budi S, selaku Komandan PTI Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bagan Sinembah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tinjauan langsung kelapangan bersama Rekan kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta bagian Satlantas



Keadaan trotoar Pasar Tradisional Pajak lama Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Keadaan bahu jalan Pasar tradisional Pajak lama



Keadaan tempat parkir yang terletak di bahu Jalan lintas Kecamatan Bagan Sinembah

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul ***“Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional Di Kawasan Tepi Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdaya Pasar Tradisional Kecamatan Bagan Sinembah”***

yang ditulis oleh :

Nama : **MIFTAH AYU ERISMA**
 NIM : **11727201991**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 01 Juli 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Daring / Online**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji I
Rudiadi, SH., MH

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis., SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1191/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

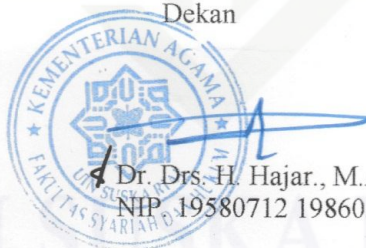
Nama	: MIFTAH AYU ERISMA
NIM	: 11727201991
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Pasar tradisional pajak lama Bagan Sinembah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KAWASAN TEPIAN JALAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/37813
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1191/2021 Tanggal 18 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MIFTAH AYU ERISMA |
| 2. NIM / KTP | : | 11727201991 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KAWASAN TEPIAN JALAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PASAR TRADISIONAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIFTAH AYU ERISMA
 NIM : 11727201991
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo / 18 November 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional Di Kawasan Tepi Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdaya Pasar Tradisional Kecamatan Bagan Sinembah”*** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

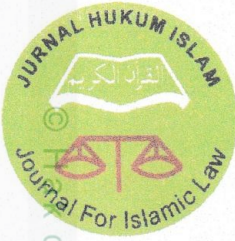
Pekanbaru, 06 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



MIFTAH AYU ERISMA

NIM. 11727201991



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MIFTAH AYU ERISMA
NIM : 11727201991
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KAWASAN TEPI JALAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 PENGELOLA DAN PERBERDAYA PASAR TRADISIONAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

Pembimbing: Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Miftah Ayu Erisma lahir di Sidomulyo 18 November 1999.

Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Drs.

Elizar Siregar dan Ibunda RA. Rismawati.

Pendidikan formal penulis diawali di SDN 010 Harapan

Makmur dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Bagan Sinembah dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Bagan Sinembah dan lulus pada tahun 2017. Kemudian langsung melanjutkan studi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada Tahun 2019 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB setelah itu pada tahun 2020 melanjutkan KKN DR-Plus di Kecamatan Bagan Sinembah Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan yang pada saat itu kondisinya sedang pandemi Covid-19. Pada tanggal 1 Juli 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi *“Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional Di Kawasan Tepi Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdaya Pasar Tradisional Kecamatan Bagan Sinembah”*.